

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai bahan kajian. Adapun hasil dari penelitian yang dikaji yaitu tentang akuntabilitas dan analisis sistem informasi akuntansi dalam penjualan kredit.

Gracesia (2017), menyimpulkan bahwa sistem akuntansi penjualan kreditnya belum berjalan secara efektif dan efisien. Penjualan Kredit pada CV. Putra Tunas Mandiri - Padang belum melaksanakan sistem informasi akuntansi sesuai dengan teori akuntansi yang diungkapkan oleh Mulyadi (2016). Dimana terdapat perangkapan tugas dalam satu bidang. Seperti, bagian administrasi melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh bagian penjualan dan juga terdapat banyak kelemahan pada sistem informasi akuntansi pada CV. Putra Tunas Mandiri-Padang seperti : Administrasi tidak mengecek barang yang dipesan pembeli terlebih dahulu digudang, tidak adanya persetujuan direktur pada faktur penjualan kredit, bagian gudang tidak membuat kartu gudang, dokumen faktur penjualan kredit kurang lengkap, tidak ada dokumen surat penagihan kepada pelanggan, Tidak ada kartu piutang untuk mencatat piutang pelanggan, tidak terdapatnya kartu persediaan pada bagian administrasi untuk dapat dicocokkan dengan kartu gudang.

Prasetyati (2016), menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan pada PT Eka Timur Raya Purwodadi Pasuruan belum baik, hal ini dapat didasarkan dari: hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia(SDM) belum sesuai kualitas dan tanggungjawabnya yaitu bagian produksi bukanlah lulusan sarjana akuntansi jadi tidak sesuai dengan bidangnya. Prosedur penerimaan pesanan penjualan masih di anggap belum cocok untuk melanjutkan ke aktivitas selanjutnya dikarenakan proses pembuatan faktur penjualan, jika order tidak disetujui karena persediaan tidak mencukupi atau harga yang tidak dapat disepakati perusahaan biasanya akan mengembalikan surat order yang dikirimkan oleh pelanggan tersebut atau pelanggan di minta merevisi order sesuai dengan persediaan barang yang ada.

Sargio *et al.* (2018), menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap Sumber Daya Manusia pada KSU BMT Sarana Wiraswasta diketahui memiliki struktur organisasi yang sederhana dan memiliki batas yang memisahkan tugas pada setiap bagian. Sumber Daya Manusia dinilai telah sesuai dan baik dinilai dari antusias karyawan dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas harus memenuhi unsur-unsur seperti pendidikan, pengalaman, produktifitas, dan keahlian. Rata-rata karyawan pada KSU BMT Sarana Wiraswasta telah mempunyai latar belakang S1 dengan jurusan yang sesuai serta mempunyai pengalaman kerja walaupun masih ada juga yang masih berlatar belakang SMA. Untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia agar lebih berkualitas, BMT Sarana Wiraswasta juga telah memberikan program yang dapat membuat karyawannya semakin kompetitif dan produktif. Beberapa program tersebut yaitu pemberian penghargaan serta bonus terhadap karyawan yang

berprestasi dan selalu diadakan kajian rutin setiap pekan, serta adanya perpindahan jabatan setiap empat tahun sekali. Hasil analisis terhadap alat-alat yang digunakan pada KSU BMT Sarana Wiraswasta diketahui, setiap data transaksi telah diproses secara komputerisasi dan telah dilengkapi dengan alat-alat seperti brankas yang mencegah kemungkinan terjadinya pencurian terhadap kas yang ada ditangan, seperti ruang brankas tersendiri dengan kotak brankas sebagai tempat penyimpanan uang, dokumen-dokumen penting dan juga dilengkapi dengan alat pendeteksi uang palsu. Namun ada beberapa alat yang digunakan masih belum menggunakan alat-alat yang canggih yaitu diantaranya proses sistem informasi akuntansi seperti komputer yang masih berbasis OS windows XP dan software yang digunakan masih mempertahankan software lama yaitu Microsoft Visual Foxpro.

Kesimpulan dari hasil penelitian di atas yang menjadi referensi saya antara lain:

Pada penelitian terdahulu tentang masalah ini dilakukan oleh beberapa peneliti yang menjadi referensi saya antara lain: hasil penelitian Gracesia (2017) pada CV. Putra Tunas Mandiri - Padang belum melaksanakan sistem informasi akuntansi sesuai dengan teori akuntansi yang diungkapkan oleh Mulyadi (2016). Dimana terdapat perangkapan tugas dalam satu bidang dan kelemahan pada sistem informasi akuntansinya, seperti: bagian administrasi melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh bagian penjualan, bagian administrasi tidak mengecek barang yang dipesan pembeli terlebih dahulu digudang, tidak adanya persetujuan direktur pada faktur penjualan kredit, bagian gudang tidak membuat kartu gudang, dokumen faktur penjualan kredit kurang lengkap, tidak ada dokumen surat

penagihan kepada pelanggan, tidak ada kartu piutang untuk mencatat piutang pelanggan, tidak terdapatnya kartu persediaan pada bagian administrasi untuk dapat dicocokkan dengan kartu gudang.

Hasil penelitian Sargio *et al.* (2018) memiliki kekurangan dalam bidang komputerisasi yang masih menggunakan OS windows xp dan mempertahankan software lama yaitu Microsoft visual foxpro. Hasil penelitian Prasetiayati (2016) pada PT Eka Timur Raya Purwodadi Pasuruan menunjukkan bahwa SDM belum sesuai kualitas dan tanggung jawabnya yaitu pada bagian produksi belum lulusan sarjana akuntansi, prosedur penerimaan pesanan penjualan masih belum cocok dikarenakan apabila order tidak disetujui karena persediaan tidak mencukupi atau harga yang tidak dapat disepakati perusahaan biasanya akan mengembalikan surat order yang dikirimkan oleh pelanggan tersebut atau pelanggan diminta merevisi order sesuai dengan persediaan barang yang ada.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan (Steinbart dan Romney, 2014)

Menurut Krismiaji (2010) sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistem informasi akuntansi harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data transaksi, data lain yang mendukung, dan memasukanya ke sistem
- b. Memproses data transaksi
- c. Menyimpan data untuk arsip dan keperluan yang akan datang
- d. Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan, atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di komputer

2. Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi memiliki beberapa unsur pokok, menurut Midjan dan Susanto (2003) yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan potensi manusia atas peranannya untuk melaksanakan suatu sistem informasi akuntansi didalam sebuah perusahaan

- b. Alat

Alat merupakan semua sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan pelaksanaan suatu sistem informasi akuntansi didalam sebuah perusahaan

- c. Metode, yang terdiri dari:

- 1) Organisasi

Organisasi merupakan tempat kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan Bersama dalam koordinasi suatu bangunan sistem. Organisasi berarti penentu pengelompokan dan pengaturan dari berbagai aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan Bersama

2) Prosedur

Prosedur merupakan suatu urutan dari suatu pekerjaan tata usaha yang biasanya melibatkan beberapa petugas yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang seragam dari transaksi yang berulang-ulang didalam perusahaan

3) Formulir

Formulir merupakan alat bantu yang berupa daftar isian yang berfungsi sebagai alat bukti atas terjadinya transaksi

4) Pencatatan

Pencatatan merupakan keluaran dari suatu sistem pengelolaan data yang melibatkan koordinasi manusia, alat dan metode didalam suatu perusahaan.

3. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Anastasia dan Setiawati (2011) tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Mengamankan harta atau kekayaan perusahaan. Harta meliputi kas perusahaan, persediaan barang dagangan, termasuk asset tetap perusahaan
- b. Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan
- c. Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. Setiap pengelola usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak, besarnya pajak yang dibayar tergantung pada omset penjualan atau tergantung pada laba rugi usaha. Tanpa sistem yang baik, bisa jadi pengelola kesulitan untuk menentukan besarnya omset dan besarnya laba rugi usaha

- d. Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. Sistem informasi juga dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja karyawan
- e. Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit. Data yang tersimpan dengan baik sangat memudahkan proses audit.

4. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Azhar (2008) ada tiga fungsi dari sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk mencapai tujuan sistem informasi tersebut. Ketiga fungsi tersebut sangat erat hubungannya satu sama lain sehingga harus dilihat secara keseluruhan, antara lain ketiga fungsi tersebut:

- a. Menukung aktivitas perusahaan sehari-hari

Agar perusahaan tetap dapat bertahan maka harus beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnis yang terjadinya disebut dengan transaksi seperti melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi dan penjualan.

Ada dua transaksi antara lain transaksi akuntansi dan nonakuntansi. Transaksi akuntansi adalah kejadian yang dimana perusahaan melakukan pertukaran antara sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, seperti penjualan dan pembelian barang. Transaksi nonakuntansi adalah kejadian yang dimana transaksi perusahaan tidak menimbulkan adanya pertukaran nilai ekonomi, seperti memasukkan data order pembelian ke computer dan menyiapkan barang untuk dikirim.

b. Mendukung proses pengambilan keputusan

Salah satu tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, yang dimana harus untuk perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan. Informasi yang tidak dapat diperoleh dari sistem informasi akuntansi tapi diperlukan dalam proses pengambilan keputusan biasanya bersifat kuantitatif yang tidak bersifat uang dan data kualitatif. Informasi ini dapat diperoleh bila perusahaan menerapkan sistem informasi manajemen, karena sistem informasi manajemen mencakup sistem informasi perusahaan keseluruhan sedangkan sistem informasi akuntansi yang dihasilkannya bersifat detail.

c. Membantu mengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal

Setiap perusahaan harus mampu memenuhi tanggung jawab hukum. Salah satu tanggung jawab penting adalah keharusan memberikan informasi kepada pemakai yang berada diluar perusahaan atau stakeholder yang meliputi pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor besar, serikat kerja, analisis keuangan, asosiasi industri, atau bahkan publik secara umum.

5. Bank Syariah

Sejak disahkannya UU No 7 tahun 1992 dan disempurnakan lagi dalam UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah, dimana pemerintah membuka peluang baru kepada para pelaku perbankan di Indonesia dan juga Lembaga keuangan lainnya untuk melakukan kegiatan operasional perbankan dengan

perinsip-perinsip syariah. Terlebih adanya fatwa haram bagi bunga bank dari MUI pada tahun 2003 yang menyebabkan banyak bank menjalankan perinsip syariah.

Menurut Sudarsono (2008) bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan perinsip-perinsip syariah

Pengertian bank dan bank syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan perinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pada pasal 1 ayat 12 dijelaskan perinsip syariah adalah perinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwah yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwah di bidang syariah

Menurut Muhammad (2005) bank islam atau bank tanpa bunga adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan perinsip syariat islam

6. Fungsi Bank Syariah

Fungsi dari bank syariah menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) antara lain sebagai berikut:

- a. Bank syariah sebagai manajer investasi yang dimana bank syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dan menghimpun dengan menggunakan akad Mudharabah

- b. Bank syariah sebagai investor yang berhubungan dengan pembagian hasil usaha dari dana bank syariah maupun dari nasabah yang dipercayakan kepadanya sesuai prinsip syariah dan dibagi sesuai nisbah yang di sepakati oleh pihak bank dan pemilik modal
- c. Bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan dan lalulintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- d. Bank syariah sebagai fungsi sosial yang dimana bank syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh, serta pinjaman kebajikan sesuai ketentuan yang berlaku

7. Penyaluran dana

Penyaluran dana bank syariah menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip jual beli

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk membelikan barang dan dikirim. Harga jual barang ditentukan dari harga pokok ditambah keuntungan. Prinsip jual beli dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli yang dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli

- 2) Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang dipejual belikan belum ada, maka barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai
- 3) Istishna hampir sama dengan salam akan tetapi dalam pembiayan ini pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Pembiayaan ini diterapkan pada pembiayan manufaktur dan kontruksi

b. Perinsip ijarah (sewa)

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat yang diamana perinsip ini hampir sama dengan jual beli, namumn perbedaanya ijarah objeknya transaksi adalah jasa dan manfaat barang.

- c. Perinsip syirkah, perinsip ini berbasis pada pola kemitraan untuk produk yang pembiayaan di bank syariah di operasikan dengan pola musyarakah dan mudharabah.
- d. Akad pelengkap biasanya dibutuhkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akan pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan

8. Pengertian Pembiayaan

Pengeritan pembiayaan menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 12 adalah:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tahihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentul mudharabah dan musyarakah

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan antara bank syariah, UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai atau memberi modal dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

9. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Menurut Antonio (2009) pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, antara lain:

- a. Pembiayaan produktif, yang dimana pembiayaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam artian luas untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif yang dimana pembiayaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

10. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori, yaitu: (1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, (2) Pembiayaan dengan prinsip

sewa, (3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, (4) Pembiayaan dengan akad pelengkap. Murabahah menurut (Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000) merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Antara kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

Adapun perinsip-perinsip Syariah sebagai berikut : Sholahuddin dan Hakim (2008).

a. Universal

Tidak membedakan kepada berbagai pihak karena adanya suatu latar belakang suku, agama, ras, dan golongan dalam memberikan pelayanan.

b. Jelas

Perinsip ini tercermin dari cara penyampaian informasi dalam kontrak mengenai tanggungjawab dari kondisi pembiayaan yang disepakati secara Bersama

c. Bersih

Hanya dengan menggunakan tata cara pembiayaan Syariah untuk menjamin semua transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Syariah Islam.

d. Terbuka

Penawaran harga disampaikan secara rinci dan transparan mengenai harga pokok produk dan margin keuntungan yang diinginkan oleh Lembaga pembiayaan sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh Lembaga pembiayaan sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan Bersama.

e. Adil

Melalui pembiayaan Syariah, Lembaga pembiayaan “X” menempatkan nasabah sebagai pengguna dana dan dalam hak, kewajiban, keuntungan dan resiko yang berimbang dengan cara adil dan merata.

f. Jujur

Jujur dalam menyampaikan informasi yang sesuai dengan kondisi dan adanya.

11. Syarat Pembiayaan Murabahah

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad murabahah berlaku persyaratan sebagai berikut:

1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang
2. Jangka waktu pembayaran harga barang beli nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah

3. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank
4. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka saat meandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah
5. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank
6. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad
7. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proposional

12. Akad Wakalah

Wakalah adalah pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lain untuk mewakilkan dalam hal-hal yang diperbolehkan. Islam mensyaratkan akad wakalah karena manusia membutuhkannya akan tetapi tidak semua manusia mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikannya dengan akad wakalah (Antonio, 2009).